

ABSTRAK

Penelitian dalam tesis ini dilatar belakangi oleh maraknya permasalahan dan ketimpangan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha di bidang transportasi darat khususnya di bidang angkutan sewa khusus yang dikenal sebagai angkutan sewa berbasis online. Dari hal tersebut timbullah suatu permasalahan mengenai; 1. Bagaimana implementasi dari penggunaan kendaraan pribadi yang digunakan sebagai angkutan sewa khusus berdasarkan “Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek” 2. Bagaimana tanggung jawab Grab Car Indonesia terhadap kerugian yang dapat timbul apabila terjadi kerugian terhadap *driver* dan pemilik kendaraan pribadi yang digunakan sebagai angkutan sewa khusus. 3. Upaya apakah yang dapat dilakukan oleh *driver* dan pemilik kendaraan pribadi yang digunakan sebagai angkutan sewa khusus oleh pihak Grab Car Indonesia jika terjadi sengketa atau permasalahan hukum.

Penelitian dalam tesis ini menggunakan spesifikasi *deskriptif analitis* dengan metode pendekatan *yuridis normatif*. Tahap penelitian yang dilakukan adalah melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang diperoleh untuk penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut diketahui bahwa: 1. Masih sangat banyak kendaraan yang digunakan sebagai angkutan sewa khusus tidak menempelkan sticker tersebut untuk memasang sticker sebagai alat identifikasi bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan sewa khusus, sebagaimana yang tertuang pada Pasal 27 Ayat 1 huruf D PERMENHUB Nomor 108 Tahun 2017. 2. Pemilik kendaraan pribadi yang dijadikan angkutan sewa khusus tidak dapat menuntut ganti rugi secara perdata kepada pihak Grab Indonesia karena status dari perusahaan tersebut adalah penyedia jasa aplikasi bukan sebagai perusahaan angkutan umum. 3. Banyak driver dari angkutan sewa khusus mendaftarkan diri dan kendaraannya secara perorangan yang seharusnya Grab Car Indonesia tidak boleh meloloskan seseorang yang mendaftarkan dirinya secara personal melainkan harus melalui badan hukum. Akibat dari itu maka driver tidak mempunyai perlindungan hukum apabila terjadi sengketa atau mengalami kerugian secara pidana maupun secara perdata.

Kata kunci : Grab Car Indonesia, Angkutan Berbasis Online

ABSTRACT

The research in this thesis was based on the rise of problems and inequality posed by business activities in the field of land transportation, especially in the field of special rental transport known as online-based rental transport. The issues arose as a matter of; 1. How was the implementation of the use of a private vehicle as special rental transport applied based on the "Regulation of the Minister of Transportation Number 108 Year 2017 About Implementation Transit Person Not on Route 2. How Grab Car Indonesia was responsible if there were losses rose to the drivers and owners of private vehicles used as special rental transport. 3. What kind of effort could be done by drivers and owners of private vehicles, which is used as a special rental transport by GrabTaxi Car Indonesia, in the event of a dispute or legal issue.

The research in this thesis used a descriptive analytical specification with a normative juridical method of approach. The research phase was used literature research and field research. The data collection techniques undertaken were library studies and interviews. Based on the methods of approach applied in this research, the qualitative juridical method used to analyze all the collected data.

The result obtained from this research showed that: 1. There were many vehicles, used as a special rental transport, did not attach the sticker that identified vehicles used as special rental transport, as contained in Article 27 Section 1 letter D PERMENHUB Number 108 Year 2017. 2. The owner of a private vehicle, whose car used as a special rental transport, could not claim civil compensation to Grab Indonesia due to the status of the company, which was an application service provider, not as a public transport company. 3. Many drivers registered themselves and their vehicles on individual basis, while technically Grab Indonesia should not pass whoever registered themselves individually. They were supposed to register themselves through legal entity. The final result of the research was that the drivers had no legal protection if a dispute arose, or when the loss of criminal and civil laws occurred.

Keywords: Grab Car Indonesia, Online-based transportation